

DAMPAK MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA *CARBON EMISSION DISCLOSURE*

Qonita Avena Zada¹; Shinta Permata Sari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Surakarta^{1,2}

Email : qonitaazadaa12@gmail.com¹; sps274@ums.ac.id²

ABSTRAK

Pengungkapan emisi karbon menjadi kontribusi nyata perusahaan terhadap masalah pemanasan global yang diinformasikan dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan. Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak mekanisme *good corporate governance* pada *carbon emission disclosure*. Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi pada studi ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2020-2022, sementara sampelnya sebanyak 151 perusahaan di sektor Barang Konsumen non Primer yang diambil dengan teknik *purposive* sampling. Hasil dari studi ini membuktikan dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Kata kunci : *Carbon Emission Disclosure*; Dewan Komisaris Independen; Komite Audit; Kepemilikan Manajerial

ABSTRACT

Carbon emission disclosure is the company's real contribution to the global warming problem which is informed in the annual report or sustainability report. This study aims to analyze the impact of good corporate governance mechanisms on carbon emission disclosure. This study is a quantitative research using secondary data. The population in this study is companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2020-2022 period, while the sample is 151 companies in the non-Primary Consumer Goods sector taken using purposive sampling techniques. The results of this study prove that the independent commissioners board and managerial ownership have an influence on carbon emission disclosure, while the audit committee has no influence on carbon emission disclosure.

Keywords : Carbon Emission Disclosure; Independent Commissioners Board; Audit Committee; Managerial Ownership

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan, khususnya isu perubahan iklim, semakin menjadi fokus perhatian global. Perusahaan industri, sebagai salah satu sumber emisi karbon yang signifikan, mendapat sorotan khusus sebagai usaha dalam mengurangi pengaruh negatif pada lingkungan (Filho et al., 2023). Pengungkapan Emisi Karbon menjadi penting untuk memahami sejauh mana perusahaan ini bersedia dan mampu

mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon mereka (Anggita, Nugroho, dan Suhaidar, 2022).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sektor industri yang terus berkembang, memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi masalah lingkungan, termasuk emisi karbon. Dalam usaha untuk menurunkan dampak buruk emisi karbon, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan yang mendorong seluruh perusahaan agar mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon mereka (Munadiya, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sejumlah 29-41% di tahun 2030, berdasarkan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 terkait “Ratifikasi Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim”. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 mengemukakan “perseroan terbatas yaitu perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan industri yang lebih pesat akan memiliki korelasi yang positif dengan meningkatnya emisi GRK dari produksi usaha dan kegiatan operasional. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tersebut dalam upaya mengurangi rusaknya lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri.

Kontribusi suatu perusahaan terhadap isu pemanasan global dapat ditunjukkan melalui pengungkapan emisi karbonnya, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Pemangku kepentingan akan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi secara bertanggung jawab mengenai kinerja lingkungannya jika perusahaan mengungkapkan emisi karbonnya (*Carbon Emission Disclosure*). Giannarakis (2015) menyatakan “karena adanya permintaan dari pemangku kepentingan seperti pemegang saham dan pelanggan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, perusahaan memainkan peran penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca”. Analisis *carbon emission disclosure* ialah salah satu metode penilaian dan evaluasi portofolio bagi suatu perusahaan. Namun di Indonesia, praktik *carbon emission disclosure* ini masih dilakukan dalam bentuk pengungkapan sukarela, dan dunia usaha jarang terlibat dalam kegiatan ini (Jannah dan Muid, 2014). Akibatnya,

hanya sedikit pelaku usaha yang bersedia mengungkapkan jumlah emisi karbon yang mereka hasilkan (Simamora, Safrida, dan Elviani, 2022).

Tidak diragukan lagi bahwa tesis legitimasi ini bertentangan dengan sedikitnya jumlah emiten yang melaporkan emisi karbon. Menurut Ismainingtyas, Suryono, & Wahidahwati (2020), perusahaan seharusnya memastikan bahwa operasinya mematuhi standar sosial dan dapat divalidasi oleh pihak eksternal agar teori legitimasi dapat diterapkan. Pihak-pihak yang mempunyai kemampuan mengawasi dan memberikan tekanan kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan Pengungkapan Emisi Karbon wajib menyelesaikan masalah ini. Menurut Irmayanti & Mimba (2018), teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa bisnis memerlukan dukungan pemangku kepentingannya agar dapat beroperasi, menjelaskan pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan tekanan pada perusahaan. Teori ini lebih lanjut didukung oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa perusahaan bisa memakai biaya keagenan—yakni biaya tambahan dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap tindakan dari manager—untuk menyelesaikan konflik antara prinsipal dan agen sebagai pemberi laporan. Contoh biaya tambahan tersebut mencakup biaya pembentukan komite audit atau dewan komisaris (Gitman & Zutter, 2015).

Kerangka *Good Corporate Governance* (GCG) menyebutkan dan mengatur permasalahan tanggung jawab dan keterbukaan, serta peran pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan internal perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan menurut Tamara & Budiasih (2020) merupakan penerapan dua prinsip GCG yaitu tanggung jawab dan transparansi. GCG didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme pengawasan dan pengendalian perusahaan lewat relasi yang terjalin di antara pemangku kepentingan, baik internal ataupun eksternal, sebagaimana dikemukakan oleh Indonesia Corporate Governance Forum (2006) dalam Irmayanti & Mimba (2018).

Dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, suatu perusahaan perlu mempunyai dewan komisaris independen, yaitu individu yang tidak memiliki keterkaitan terhadap investor, direktur, komisaris, dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur dalam perusahaan lain. Dewan komisaris mempunyai tugas utama untuk mengawasi dan memberi saran pada direksi perusahaan (Trufvisa dan Ardiyanto, 2019). Pengawasan ini juga relevan dengan prinsip GCG, terutama prinsip transparansi yang

mewajibkan perusahaan memberikan dengan tepat waktu, jelas, dan bisa dibandingkan, terutama terkait kondisi keuangan dan pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan kepemilikan. Seluruh aktivitas perusahaan, termasuk *carbon emission disclosure*, harus dilaporkan secara transparan. Studi terdahulu yang pernah diteliti oleh Saraswati et al., (2021) dan Zanra et al., (2020) memberikan bukti bahwa “dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*”. Menurut Ardillah dan Rusli (2022) dewan Komisaris dengan independensinya dinilai mampu mengurangi asimetri informasi dengan menjaga transparansi informasi bagi *stakeholders*. Dewan komisaris independen tidak bisa mendorong perusahaan dalam membuat kebijakan namun hanya dapat memberikan kebijakan dalam memacu perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Sesuai dengan teori *stakeholders* dimana pihak yang tidak terafiliasi dari dewan komisaris harus memantau dan mendorong perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon untuk pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

Komite audit adalah proksi dari mekanisme *Good Corporate Governance*. Komite audit ini bagian dari mekanisme *Corporate Governance* yang keberadaannya diharapkan bisa melakukan suatu pengawasan yang baik bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan. Komite Audit merupakan beberapa anggota dewan direksi yang dipilih mempunyai tanggungjawab menolong agar auditor senantiasa independen dari manajemen (Effendi dan Ulhaq, 2021). Proporsi dari komite audit ini dapat memonitor kinerja manajemen sehingga keberadaannya dapat meminimalisasi perilaku manajemen yang menyimpang. Hal ini bisa memberikan dorongan bagi manajemen dalam mengungkapkan pelepasan karbon pada *sustainability report*. Widagdo et al., (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan “jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap laporan emisi gas rumah kaca”. Semakin aktif komite audit perusahaan dalam melakukan rapat, sehingga semakin tinggi insentif perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbonnya pada *annual report* atau *sustainability report* perusahaan. Perusahaan melalui total rapat komite audit yang terselenggara bisa menstimulus perusahaan untuk melangsungkan praktik *carbon emission disclosure* sebagai sinyal perusahaan kepada *stakeholder* agar mendapatkan legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* (Saptiwi, 2019). Selain itu, pengawasan lebih maksimal terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan bisa dicapai dengan

terselenggaranya komite audit dimana komite audit sebagai dorongan agar perusahaan menerapkan praktik *carbon emissions disclosure* (Suherman dan Kurniawati, 2023).

Selain komite audit, proksi *Good Corporate Governance* lainnya adalah kepemilikan manajerial. Simamora et al. (2022) menyatakan dalam teori legitimasi menunjukkan adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat menjadikan pengelolaan lebih baik dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dari *carbon emissions disclosure*. Shan, Tang, dan Zhang (2021) dalam penelitiannya membuktikan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan transparansi karbon di wilayah konvergensi kepentingan yang rendah (0%–10%) dan tinggi (di atas 30%) di Australia. Namun demikian, hubungan ini menjadi negatif ketika kepemilikan berada di wilayah kubu (10%–30%). Manager yang kepemilikannya berada di kawasan yang memiliki konvergensi kepentingan cenderung terbuka dan menerapkan strategi proaktif, sedangkan manager yang sudah mengakar cenderung tidak transparan, sehingga menjadi tidak peka terhadap seruan stabilisasi iklim dan transparansi karbon.

Toni dan Anggara (2021: 13) mengatakan “untuk memberikan skala penentuan ukuran suatu bisnis berdasarkan total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar”, studi ini memakai ukuran perusahaan sebagai variable kontrol. Ukuran perusahaan bisa meningkatkan *carbon emissions disclosure*. Perusahaan yang berukuran besar akan memberi dampak yang lebih signifikan terhadap lingkungan, dan ketersediaan informasi mengenai dampak tersebut harus lebih banyak (Andriadi, Werastuti, dan Sujana, 2023).

Penelitian ini memberikan kontribusi terkait tinjauan tentang *carbon emissions disclosure* yang dihubungkan dengan aspek-aspek utama GCG dalam konteks perusahaan di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian konsep GCG, seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, dengan fokus ke praktik pengungkapan emisi karbon termasuk menyoroti peran ukuran perusahaan sebagai variable kontrol. Studi ini tidak hanya memberi pemahaman yang mendalam terkait berbagai faktor yang berpengaruh pada transparansi karbon, tetapi juga menekankan relevansi konteks bisnis di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Carbon Emission Disclosure

Salah satu jenis gas rumah kaca adalah karbon (GRK). Secara global, regional, nasional, dan lokal di suatu negara, konsentrasi gas rumah kaca terus mengalami

peningkatan seiring waktu berjalan. Karbon sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup organisme hidup, meskipun faktanya karbon melimpah di alam semesta. Operasi perusahaan adalah sumber utama emisi. Menurut (Saptiwi, 2019)), perusahaan menggunakan sejumlah besar bahan bakar yang melepaskan emisi karbon selama aktivitas operasinya. Dengan demikian, dunia usaha berkontribusi terhadap perubahan iklim dan peningkatan pemanasan global. *Carbon emission disclosure* adalah salah satu cara perusahaan menerima akuntabilitas atas operasinya.

Menurut definisinya, pengungkapan karbon adalah kumpulan data kuantitatif dan kualitatif tentang tingkat emisi karbon perusahaan secara historis dan yang diantisipasi, paparan dan konsekuensi keuangan dari risiko serta peluang mengenai perubahan iklim, serta upaya yang dilakukan saat ini dan yang direncanakan untuk mengelola peluang dan risiko-risiko *carbon emission disclosure* tersebut (Hapsoro dan Ambarwati, 2018). Langkah-langkah pengungkapan emisi karbon yang telah diterapkan termasuk yang dibuat oleh *Carbon Disclosure Project (CDP)* yang berasal dari riset yang diteliti oleh Choi et al. (2013) berhubungan dengan perubahan iklim dan emisi karbon, ada 5 kategori utama yang relevan diantaranya: “risiko dan peluang perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, pengurangan gas rumah kaca dan biaya serta akuntabilitas emisi karbon”.

Good Corporate Governance

Meskipun gagasan *Good Corporate Governance (GCG)* bukanlah hal baru dalam teori manajemen bisnis, setelah krisis tahun 1997, gagasan ini muncul sebagai fenomena baru dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Menurut Sari (2021: 20), GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang menggambarkan hubungan kerja sama antara manajemen dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemasok, instansi pemerintah, kreditur, pemegang saham, dan kreditur. Mekanisme *Good Corporate Governance* dikembangkan menjadi sebuah kerangka dalam melaksanakan operasional bisnis. Supaya operasional bisnis bisa berjalan dengan baik dan mengikuti jalur yang telah ditentukan, maka diperlukan mekanisme ini.

Franita (2018: 11) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang kuat sebagai memiliki seperangkat pedoman, protokol, dan relasi yang jelas di antara pihak pengambil keputusan dan pengawas. Menurut Franita (2018: 11), “mekanisme *good corporate governance* yang baik adalah seperangkat interaksi, prosedur, dan sistem

yang digunakan organ perusahaan—Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham—untuk terus menerus dan secara berkelanjutan memberikan nilai tambah jangka panjang kepada pemegang saham, jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lainnya, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan konvensi yang relevan.”

Dewan Komisaris Independen

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 1 ayat (3) “Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi”. Komisaris independen ialah salah satu dari jumlah minimum anggota dewan komisaris sebuah perusahaan. Sesuai pendapat Azis et al. (2022), “peningkatan persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh perusahaan. Meningkatnya keanggotaan dewan komisaris independen bisa memotivasi dewan untuk bertindak tidak memihak dan secara efektif melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Untuk benar-benar mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lain dan memperkuat independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham, diperlukan komisaris independen”.

Teori *stakeholder theory* seperti yang dikemukakan oleh Roberts (1992) mengklasifikasikan dewan komisaris sebagai pemangku kepentingan karena potensi pengaruhnya terhadap tujuan dan hasil organisasi. Menurut Setyani dan Suhaili (2023), teori keagenan menyebutkan bahwa “kehadiran komisaris independen dapat memberikan tekanan kepada manajemen yang memiliki fungsi pengawasan untuk mengatasi masalah keagenan dan mendorong direksi untuk mengungkapkan suatu hal yang menjadi kepentingan publik, misalnya emisi karbon, sejalan dengan kepentingan pemegang saham”. Menurut riset terdahulu dari Nainggolan dan Rohman (2015) serta Pramuditya dan Budiasih (2020), komisaris independen berdampak baik terhadap pengungkapan emisi karbon.

H₁: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Komite Audit

Komponen *good corporate governance* yang penting salah satunya yaitu komite audit. Komite ini mendukung pendirian auditor apabila manajemen dan auditor tidak dapat sepakat. Dalam situasi ini, auditor eksternal mungkin lebih mudah berdebat dengan manajemen berkat independensi komite audit. Isyuardhana dan Rahmawati (2023) mengungkapkan “kualitas penting untuk efektivitas komite audit adalah independensi. Mewajibkan direktur independen untuk bertugas di komite audit merupakan salah satu rekomendasi Blue Ribbon Committee (BRC) untuk meningkatkan efektivitas komite”.

Ikatan Komite Audit Indonesia (2023) mengemukakan “komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepadanya untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab dewan. Pada dasarnya, tanggung jawab utama komite audit adalah mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pemeriksaan sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efisiensi departemen audit internal semuanya termasuk dalam hal ini. Memeriksa risiko yang dihadapi perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan merupakan bagian integral dari tanggung jawab komite audit.”

Dalam teori pemangku kepentingan, kelompok yang dapat mempengaruhi atau memberikan tujuan yang tegas disebut sebagai pemangku kepentingan (Roberts, 1992). Komite audit merupakan pemangku kepentingan karena mendukung tanggung jawab komisaris perusahaan untuk pengawasan internal, sebagaimana dinyatakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dan publikasinya tentang pedoman GCG. Pramuditya dan Budiasih (2020) mengklaim bahwa “hal ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon perusahaan secara sukarela dapat dilakukan secara lebih intensif karena pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi kemungkinan manipulasi dan pengurangan pengungkapan”. Menurut penelitian Saptiwi (2019), Suherman dan Kurniawati (2023), serta Angelina dan Handoko (2023), anggota komite audit berdampak pada seberapa banyak elemen emisi karbon yang diungkapkan suatu perusahaan.

H₂: Komite audit berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure* .

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dan direktur perusahaan. Sebagai upaya mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, kepemilikan manajemen adalah hasilnya. Khafid et al. (2022: 54) menyarankan bahwa “salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan yang berbeda ini adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dan membangun mekanisme pemantauan”.

Definisi dari kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan yang aktif berpartisipasi mengambil suatu keputusan operasional perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham manajerial, maka manajemen semakin aktif demi kepentingan pemegang saham, sebab bila diambil keputusan yang buruk maka manajemenlah yang akan menanggung akibatnya (Haloho, 2021).

Sukiranto (2021) menegaskan “kepemilikan manajemen mempunyai dampak negatif. Perilaku oportunistik manajer kecil kemungkinannya terjadi dalam lingkungan kepemilikan manajerial yang kuat karena manajer mengalami konsekuensi langsung dari setiap keputusan yang mereka buat. Setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan berdampak pada pemegang saham, sehingga manajer dan pemegang saham akan selalu berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaan guna menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sebagai pemegang saham, termasuk kebijakan pengungkapan emisi karbon”. Adanya pelaporan emisi karbon perusahaan, nilainya akan meningkat baik bagi investor maupun masyarakat umum, sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Ukuran Perusahaan

Toni dan Anggara (2021: 13) mendefinisikan “ukuran perusahaan sebagai skala yang mengukur total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar suatu perusahaan. ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan total asetnya.” Semakin banyak aset suatu perusahaan secara keseluruhan maka semakin besar ukurannya, begitu pula sebaliknya (Effendi dan Ulhaq, 2021: 29).

Proporsi aset perusahaan menunjukkan ukurannya. (Neldi et al., 2023: 20) mengungkapkan “perolehan laba bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya

adalah ukuran perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar kekuatannya dalam menghadapi tantangan bisnis dan potensinya dalam menghasilkan keuntungan yang signifikan karena didukung oleh aset yang besar sehingga mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada.” Perusahaan dengan total asset yang besar mengandung arti bahwa suatu perusahaan itu sudah meraih tahap kedewasaan, di mana arus kas perusahaan tersebut positif dan diperkirakan mempunyai prospek yang baik dalam kurun waktu yang relatif cukup lama.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian kuantitatif dipilih sebagai jenis penelitian pada studi ini. Populasi pada studi ini yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 hingga 2022, sedangkan sampelnya berjumlah 151 perusahaan barang konsumsi non primer yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang mana pencarian sample dengan menggunakan syarat-syarat tertentu, antara lain: “(1) Perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif pada periode 2020-2022; (2) Perusahaan menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara berturut-turut selama periode 2020-2022; (3) Perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) berturut-turut selama periode tahun 2020-2022”. Studi ini memakai data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi Bursa Efek Indonesia melalui website <https://www.idx.co.id/id> berupa data laporan tahunan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan keberlanjutan.

Variable dependent pada studi ini yakni *Carbon Emission Disclosure*, yaitu “kumpulan data kuantitatif dan kualitatif tentang tingkat emisi karbon perusahaan di masa lalu dan perkiraan tingkat emisi karbon; paparan dan implikasi finansial dari risiko dan peluang terkait perubahan iklim; dan tindakan di masa lalu dan masa depan untuk mengelola risiko dan peluang pengungkapan emisi karbon”. Perhitungan *Carbon Emission Disclosure* mengacu pada checklist yang disusun oleh Choi et al. (2013) dengan rumus berikut:

$$CED = (\sum di/M) \times 100$$

Keterangan:

- CED = *Carbon Emission Disclosure*/ Pengungkapan Emisi Karbon
 $\sum di$ = Total keseluruhan skor 1 yang didapat perusahaan
M = Total item maksimal yang dapat diungkapkan (18 item)

Variable independent meliputi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajemen. Dewan komisaris independen dihitung dengan cara membagi persentase komisaris independen dengan jumlah semua komisaris perusahaan yang dilaporkan pada *annual report* emiten bersangkutan. Dengan menggunakan rumus di bawah ini, perhitungan komisaris independen ini berdasar pada studi dari Liana (2019) dan Nainggolan dan Rohman (2015):

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Variabel komite audit ditentukan dengan mengambil ukuran komite audit emiten yang dapat dilihat pada laporan tahunan emiten yang bersangkutan. Rumus berikut berasal dari penelitian Isyuardhana dan Rahmawati (2023) yang digunakan dalam perhitungan komite audit ini.

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Total anggota komite audit di luar perusahaan}}{\text{Total anggota komite audit}} \times 100\%$$

Variabel kepemilikan manajerial dalam studi ini dihitung dengan berdasar pada penelitian Dalimunthe et al. (2021) dengan rumus di bawah ini.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Manajemen}}{\text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Variable kontrol pada studi ini yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dari banyaknya jumlah aset yang dipunyai perusahaan (Neldi et al., 2023: 20).

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis memakai analisis regresi linear berganda. Namun, sebelumnya harus dilaksanakan uji asumsi klasik, meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas. Selanjutnya akan dipastikan kelayakan model penelitian dengan uji F dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan deskripsi umum terkait data yang dipergunakan pada penelitian ini. Penelitian ini mengungkapkan “emisi karbon (*Carbon Emission*

Disclosure) dengan lima kategori yaitu perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, pengurangan gas rumah kaca dan biaya, serta akuntabilitas emisi karbon melalui 18 item yang diidentifikasi”, kemudian untuk variabel independent meliputi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan sebagai variable kontrol.

Sesuai dengan hasil uji statistik deskriptif yang tersaji dalam Tabel 1 dengan jumlah sampel (N) sebanyak 66 data perusahaan selama tahun 2020-2022, didapatkan informasi terkait nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Variable Dewan Komisaris Independen (DKI) menunjukkan nilai minimum 29 yang dimiliki oleh Jakarta International Hotels & Development, Tbk. (2020) hingga nilai maksimum 75 yang dimiliki oleh Pan Brothers, Tbk. (2022), dengan nilai rata-rata 45,5303 dan standar deviasi 10,26753. Variable Komite Audit (KA) menunjukkan nilai minimum 33 yang dimiliki oleh Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk. (2020) hingga nilai maksimum 75 yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra, Tbk. (2020), dengan nilai rata-rata 66,7273 dan standar deviasi 4,43603. Variable Kepemilikan Manajerial (KM) menunjukkan nilai minimum 0 yang dimiliki oleh Ace Hardware Indonesia, Tbk. (2020-2022), Indo-Rama Synthetics Tbk. (2020-2022), Matahari Department Store, Tbk. (2020-2022), Mitra Adiperkasa, Tbk. (2020-2022), Multistrada Arah Sarana Tbk. (2020-2022), Media Nusantara Citra Tbk. (2020-2022), Pan Brothers, Tbk. (2020-2022), Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (2020-2022), Surya Citra Media, Tbk., (2020-2022). Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma, Tbk. (2020-2021), Trisula Textile Industries, Tbk. (2020-2022), Integra Indocabinet, Tbk. (2020-2021) hingga nilai maksimum 60 yang dimiliki oleh Satria Mega Kencana, Tbk. (2020-2022), dengan nilai rata-rata 6,5455 dan standar deviasi 13,07750. Variable Ukuran Perusahaan (UP) menunjukkan nilai minimum 38 yang dimiliki oleh Gaya Abadi Sempurna, Tbk. (2020) hingga nilai maksimum 2.612 yang dimiliki oleh Sri Rejeki Isman, Tbk. (2020), dengan nilai rata-rata 725,2576 dan standar deviasi 20,22077. Variable *Carbon Emission Disclosure* (CED) menunjukkan nilai minimum 6 yang dimiliki oleh Indo-Rama Synthetics, Tbk. (2020), Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk. (2020), Multistrada Arah Sarana, Tbk. (2020), Mitra Pinasthika Mustika, Tbk. (2020-2022) hingga nilai maksimum 77 yang dimiliki oleh Trisula Textile Industries, Tbk. (2021), dengan nilai rata-rata 32,8333 dan standar deviasi 20,22077.

Variable ukuran perusahaan sebagai variable kontrol memperlihatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 725,2576, sedangkan nilai terendah 38 dan nilai tertinggi 2.612 dengan nilai standar deviasi sebesar 603,22786. Hal tersebut mengungkapkan bahwa sample penelitian ini mempunyai ukuran perusahaan yang bervariasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk melaksanakan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, maka persamaan regresi harus terpenuhinya asumsi klasik regresi yang dilaksanakan untuk menguji masalah normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan Tabel 2 yang disajikan, hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih dari 0,05 maka bisa disimpulkan data terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas membuktikan bahwa *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) mempunyai toleransi > 0,10 dan nilai VIF sebesar < 10 dengan demikian seluruh variable independent tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan *Spearman's rho Correlation* memberikan hasil yaitu seluruh variable independent memiliki nilai signifikansi > 0,05, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semua variable independent dalam studi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk hasil pengujian autokorelasi mempergunakan *Durbin Watson (DW-Test)* memberikan hasil bahwa diperoleh nilai sebesar 1,717, sehingga angka DW diantara -2 sampai 2 dan bisa dinyatakan bahwa tidak terjadinya gejala autokorelasi pada model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji analisis regresi linear berganda yang terjadi dalam Tabel 3, bisa disusun persamaan regresi pada studi ini dengan menggunakan $\alpha = 0,10$ (10%) adalah:

$$CED = -45,441 + 0,686DKI + 0,735KA - 0,337KM + 0,000UP + e$$

Model regresi menunjukkan konstanta sebesar -45,441 artinya jika variabel independen diasumsikan konstan rata-rata atau nilainya sama dengan 0 maka tingkat *Carbon Emission Disclosure* (CED) akan tetap sebesar -45,441. Koefisien regresi variable Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar 0,686 dapat dinyatakan bernilai positif, artinya apabila nilai variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) naik 1%, maka *Carbon Emission Disclosure* (CED) meningkat 0,686%. Koefisien regresi variable Komite Audit (KA) sebesar 0,735 menunjukkan nilai positif, yang artinya apabila nilai variabel Dewan Komisaris Independen Komite Audit (KA) naik 1%, maka

Carbon Emission Disclosure (CED) meningkat 0,735%. Koefisien regresi variable Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar -0,337 dapat dinyatakan bernilai negatif, artinya jika nilai variabel Kepemilikan Manajerial (KM) naik 1%, maka *Carbon Emission Disclosure* (CED) cenderung mengalami penurunan -0,337%.

Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model dengan Uji F, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 3,875 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007, dengan demikian ditarik sebuah kesimpulan bahwa model regresi fit sebab $0,007 < 0,05$. Hasil uji koefisien determinasi mendapatkan nilai *Adjusted R-Square* senilai 0,150 yang memperlihatkan bahwa 15% *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor Barang Konsumen non Primer yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2022 dapat dijelaskan oleh variable Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan, sementara sisanya 85% dipengaruhi oleh variable lainnya yang tidak dianalisis pada penelitian di luar model regresi ini.

Hasil perhitungan analisis regresi menyatakan bahwa dewan komisaris independen mempunyai nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,10 sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa H_1 diterima, artinya dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Hasil perhitungan variable komite audit mempunyai nilai signifikansi 0,171 lebih besar dari 0,10 sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa H_2 ditolak, artinya komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Hasil perhitungan kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi 0,088 lebih kecil dari 0,10 jadi bisa dinyatakan bahwa H_3 diterima, artinya kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Hasil perhitungan ukuran perusahaan mendapatkan nilai signifikansi 0,944 lebih besar dari 0,10 maka bisa diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Artinya besar kecilnya ukuran perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam mengungkapkan informasi tentang emisi karbon pada laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan, serta sampel pada studi ini tidak terfokus pada ukuran perusahaan tertentu.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Hasil dari uji variable dewan komisaris independen memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,004 ($<0,10$), jadi bisa diambil kesimpulan bahwa H_1 diterima, yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Berarti bahwa eksistensi dewan komisaris independen yang kuat bisa mendukung perusahaan lebih aktif dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon mereka pada laporan keuangan dan keberlanjutan. Dengan kata lain, perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen cenderung lebih transparan dan bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka.

Temuan studi ini sesuai dengan temuan studi terdahulu dari Pramuditya dan Budiasih (2020), Nainggolan dan Rohman (2015) dan Pratama (2021) yang menunjukkan dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure* sebab mereka biasanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam *good corporate governance* dan tanggungjawab sosial perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen yang independen dari kepentingan pribadi atau keluarga dengan manajemen memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih objektif dan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, dewan komisaris independen dapat memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait isu lingkungan seperti emisi karbon.

Dewan komisaris independen juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku serta mengimplementasikan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam operasional mereka. Mereka bisa mengawasi secara lebih ketat terhadap kebijakan dan praktik perusahaan terkait pengurangan emisi karbon, serta mendorong pengembangan dan implementasi program-program lingkungan yang memiliki tujuan mengurangi pengaruh negatif pada lingkungan. Dengan demikian, kehadiran dewan komisaris independen yang efektif bisa memotivasi perusahaan untuk lebih berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transparansi dalam pengungkapan informasi terkait dampak lingkungan mereka.

Pengaruh Komite Audit pada *Carbon Emission Disclosure*

Hasil dari pengujian variabel komite audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,171 ($>0,10$), dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa H_2 ditolak, yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Hal tersebut berarti bahwa keberadaan komite audit pada suatu perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait emisi karbon pada laporan keuangan dan keberlanjutan mereka. Dengan kata lain, perusahaan yang mempunyai komite audit tidak secara konsisten lebih aktif dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon mereka.

Studi ini bertolak belakang dengan riset yang sudah diteliti oleh Angelina dan Handoko (2023), Saptiwi (2019) dan Suherman dan Kurniawati (2023) yang mengungkapkan bahwa “anggota komite audit berpengaruh pada jumlah komponen-komponen emisi karbon perusahaan yang diungkapkan”. Komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *carbon emission disclosure* karena fokus utama mereka lebih tertuju pada aspek keuangan dan akuntansi perusahaan. Meskipun komite audit memiliki tanggungjawab untuk memastikan integritas laporan keuangan, mereka mungkin kurang terlibat dalam memantau atau mendorong pengungkapan informasi terkait isu lingkungan seperti emisi karbon. Kurangnya penekanan pada isu lingkungan dalam mandat dan prioritas komite audit dapat menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya pengaruh mereka terhadap *carbon emission disclosure*. Disamping itu, komite audit mungkin juga menghadapi kendala dalam sumber daya dan kapasitas untuk secara efektif mengawasi dan mendorong perusahaan dalam hal keberlanjutan lingkungan. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dengan isu-isu lingkungan untuk dapat memberikan pengawasan yang efektif. Terdapat kemungkinan, prioritas dan kepentingan komite audit mungkin lebih terfokus pada kepatuhan terhadap regulasi keuangan daripada pada aspek lingkungan. Oleh sebab itu, meskipun komite audit penting untuk menjaga integritas laporan keuangan, peran mereka dalam mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dapat menjadi terbatas karena fokus mereka yang lebih pada aspek keuangan daripada lingkungan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Sesuai dengan hasil dari pengujian variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,088 ($<0,10$), jadi bisa diambil kesimpulan

bahwa H₃ diterima, yang berarti kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Hal tersebut membuktikan bahwa manajer yang mempunyai saham dalam perusahaan cenderung mempengaruhi perusahaan agar lebih terbuka untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon.

Kepemilikan manajerial berpengaruh buruk terhadap *carbon emission disclosure*, seperti yang disampaikan oleh Sukiranto (2021), karena para manajer akan terkena dampak langsung dari setiap tindakan, kemungkinan perilaku oportunistik mereka akan berkurang dalam lingkungan dengan kepemilikan manajerial yang kuat. Setiap tindakan dari manajemen akan memberi dampak terhadap pemegang saham, oleh karena itu manajer dan investor akan selalu berupaya untuk menaikkan nilai perusahaan supaya bisa memberi keuntungan sebagai pemegang saham, bahkan dalam hal keterbukaan kebijakan penanganan emisi karbon. Dengan menyadarkan masyarakat dan investor akan emisi karbon yang dimiliki perusahaan, dengan demikian perusahaan juga akan menjadi lebih bernilai, sehingga menguntungkan semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut.

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*, kemungkinan bagi manajer yang mempunyai saham pada perusahaan memiliki insentif untuk meminimalkan pengungkapan informasi yang dapat dianggap merugikan atau sensitif, seperti emisi karbon. Terdapat kekhawatiran bahwa pengungkapan informasi negatif terkait lingkungan dapat berdampak buruk pada citra perusahaan, mengurangi kepercayaan investor, dan pada akhirnya menurunkan nilai saham yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka mungkin cenderung mengurangi tingkat transparansi terkait emisi karbon. Selain itu, kepemilikan manajerial dapat membuat manajer lebih fokus pada pencapaian target keuangan jangka pendek daripada tanggungjawab lingkungan jangka panjang. Mereka mungkin memprioritaskan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dapat langsung dirasakan, dibandingkan dengan pengungkapan praktik lingkungan yang memerlukan investasi tambahan dan tidak memberikan manfaat finansial langsung. Akibatnya, perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi kurang terdorong untuk melaksanakan pengungkapan yang lebih mendetail dan transparan terkait emisi karbon.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki dampak mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan) terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor Barang Konsumen non Primer yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya masih dilaksanakan di sektor Barang Konsumen Non Primer di Bursa Efek Indonesia, dengan periode amatan jangka pendek selama tiga tahun yaitu periode tahun 2020-2022. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya bisa diteliti dengan menambahkan periode penelitian dalam jangka menengah atau jangka panjang pada beberapa atau semua sektor yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi selanjutnya juga bisa diteliti dengan menggali dimensi-dimensi dari *good corporate governance*, sehingga dapat memperjelas pentingnya tata kelola yang tepat terhadap *carbon emission disclosure* secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriadi, K. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2023). Determinants of Carbon Emission Disclosure: A Study on Non-Financial Public Companies in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 287–310. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.46152>
- Angelina, A., & Handoko, J. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 49–68. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.15834>
- Anggita, W., Nugroho, A. A., & Suhaidar. (2022). Carbon Emission Disclosure And Green Accounting Practices On The Firm Value. *Jurnal Akuntansi*, 26(3), 464–481. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.1052>
- Ardillah, K., & Rusli, Y. M. (2022). The Effect of Corporate Governance Structures, Environmental Performance, and Media Coverages To Carbon Emissions Disclosure. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 246–263. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i2.2716>
- Azis, D. A., Alam, S., Ikhtiari, K., & Tenriwaru. (2022). Pengaruh Earning Management dan Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur. *Center of Economic Students Journal*, 5(3), 188–198. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i3.454>
- Choi, B. B., Lee, D., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25(1), 58–79. <https://doi.org/10.1108/01140581311318968>

- Dalimunthe, S., Wardah, N., & Siregar, M. E. S. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Diversifikasi Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Household Goods Yang Terdaftar Di Bursa Malaysia Periode 2014-2018. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(1), 100–122. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.012.1.06>
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Filho, W. L., Ng, A. W., Sharifi, A., Janová, J., Özuyar, P. G., Hemani, C., ... Rampasso, I. (2023). Global Tourism, Climate Change and Energy Sustainability: Assessing Carbon Reduction Mitigating Measures From the Aviation Industry. *Sustainability Science*, 18(2), 983–996. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01207-x>
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Giannarakis, G. (2015). Determinants of Social and Environmental Responsibility Disclosures. *International Journal of Sustainable Society*, 7(3), 266–285. <https://doi.org/10.1504/IJSSOC.2015.071301>
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance*. Harlow: Pearson Education Inc.
- Gusman, R. R. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Carbon Emission Disclosure pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018*. Padang: Universitas Andalas.
- Haloho, S. F. . (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 705–719.
- Hapsoro, D., & Ambarwati, A. (2018). Antecedents and Consequences of Carbon Emissions' Disclosure: Case Study Of Oil, Gas And Coal Companies In Non-Annex 1 Member Countries. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(2), 99–111. <https://doi.org/10.22146/jieb.28756>
- Ikatan Komite Audit Indonesia. (2023). Tentang Komite Audit.
- Irmayanti, K. N. D., & Mimba, N. P. S. H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Asing pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(3), 1932–1954. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p12>
- Isyuardhana, D., & Rahmawati, M. (2023). Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow, Dan Leverage. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 433–444. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3094>
- Jannah, R., & Muid, D. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1000–1010.
- Khafid, M., Sari, M. P., Baroroh, N., Jati, K. W., & Ihlashul'amal, M. (2022). *Mewujudkan Informasi Akuntansi yang Berkualitas*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Liana, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Dewan

- Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2(2), 199–208. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.69>
- Munadiya, R. (2022). Isu Keberlanjutan dan Persaingan Usaha: Kapan Otoritas Harus Campur Tangan? *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 127–137. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.66>
- Nainggolan, N. E., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 190–198.
- Neldi, M., Hady, H., & Elfiswandi, E. (2023). *Nilai Perusahaan: Price Earning Ratio (PER)*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Pramuditya, I. D. G. N. E. C., & Budiasih, I. G. A. N. (2020). Dampak Mekanisme Good Corporate Governance pada Carbon Emission Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3052–3065. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i12.p05>
- Pratama, Y. M. (2021). Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia. *Modus*, 33(2), 120–137. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i2.4644>
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Application of Stakeholder Theory. *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595–612. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90015-K](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-K)
- Saptiwi, N. W. T. (2019). Pengungkapan Emisi Karbon: Menguji Peranan Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, Karakteristik Perusahaan dan Komite Audit. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(2), 227–240. <https://doi.org/10.24167/jab.v17i2.2343>
- Saraswati, E., Puspita, N. R., & Sagitaputri, A. (2021). Do Firm and Board Characteristics Affect Carbon Emission Disclosures? *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(3), 14–19.
- Sari, M. (2021). *Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance*. Medan: Umsu Press.
- Setyani, P. Y., & Suhaili, A. (2023). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Terbuka Sektor Industri Barang Konsumsi). *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(2), 75–82. <https://doi.org/10.20527/jbp.v12i2.17078>
- Shan, Y. G., Tang, Q., & Zhang, J. (2021). The Impact of Managerial Ownership on Carbon Transparency: Australian Evidence. *Journal of Cleaner Production*, 317, 128480. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128480>
- Simamora, R. N. H., Safrida, & Elviani, S. (2022). Carbon emission disclosure in Indonesia: Viewed from the aspect of board of directors, managerial ownership, and audit committee. *Journal of Contemporary Accounting*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss1.art1>
- Suherman, Y., & Kurniawati, K. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Environmental Management System, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Carbon Emissions Disclosure. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 142–156. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.289>
- Toni, N., & Anggara, L. (2021). *Analisis Partial Least Square Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Banyuwangi: Merdeka Kreasi Group.
- Trufvisa, U. S., & Ardiyanto, M. D. (2019). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Diponegoro Journal of Accounting*;

Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, 8(3), 1–11.

- Widagdo, A. K., Rahanyamtel, B. A., & Ika, S. R. (2022). The impact of audit committee characteristics, financial performance, and listing age on greenhouse gas emission disclosures of highly emitted industry in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1016(1), 012047. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1016/1/012047>
- Zanra, S. W., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Carbon Emission Disclosure dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 148–164.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Dewan Komisaris Independen (DKI)	66	29	75	45,5303	10,26753
Komite Audit (KA)	66	33	75	66,7273	4,43603
Kepemilikan Manajerial (KM)	66	0	60	6,5455	13,07750
Ukuran Perusahaan (UP)	66	38	2612	725,2576	603,22786
Carbon Emission Disclosure (CED)	66	6	77	32,8333	20,22077

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Collinearity Statistics		Heteroscedasticity Test	
	Tolerance	VIF	Spearman's Correlation	Significance
Dewan Komisaris Independen (DKI)	0,954	1,049	0,830	0,617
Komite Audit (KA)	0,964	1,037	0,775	0,658
Kepemilikan Manajerial (KM)	0,828	1,207	0,774	0,330
Ukuran Perusahaan (UP)	0,817	1,223	0,951	0,450
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			-	0,200
Durbin-Watson Test			1,717	-

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Signifikansi
	B	Std. Error		
Constant	-45,441	38,244	2,974	
Dewan Komisaris Independen (DKI)	0,686	0,231	1,385	0,004
Komite Audit (KA)	0,735	0,531	-1,736	0,171
Kepemilikan Manajerial (KM)	-0,337	0,194	0,071	0,088
Ukuran Perusahaan (UP)	0,000	0,004	2,974	0,944
F			3,875	0,007
Adjusted R Square			0,150	

Sumber : Data diolah, 2024